

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DITJEN

PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2016





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon (021) 5730290; Faksimile 5734632

**PERATURAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Nomor : P. 1 /SET-1/2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2015-2019**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan....

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MenLHK/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2013;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019.**

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan dalam:

1.Penyusunan...

1. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Penyusunan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DITJEN,



Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc

NIP. 19581030 198203 1 004

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 memuat garis besar gambaran umum, sasaran dan langkah-langkah pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama 5 (lima) tahun ke depan, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan penganggaran kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat berjalan secara efektif dan efisien dan menjadi bagian dalam mendukung pencapaian target pembangunan kehutanan hingga tahun 2019.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc
NIP. 19581030 198203 1 004

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi	3
C. Capaian Sampai Dengan Tahun 2014 (Periode Renstra Tahun 2010-2014)	6
D. Potensi dan Tantangan	8
E. Kondisi yang diinginkan	9
F. Sistematika	10
BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN KEGIATAN	11
A. Arah Kebijakan	11
B. Sasaran Kegiatan	11
BAB III SASARAN DAN KINERJA UNIT KEGIATAN	13
A. Sasaran Unit Kegiatan	13
B. Indikator Kinerja	13
BAB IV KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN	22
A. Kerangka Regulasi	22
B. Kerangka Pendanaan	22
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Adapun fungsi Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan:

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d) Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. **Bagian Program dan Evaluasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; (b) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan (c) penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan. Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
 - b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

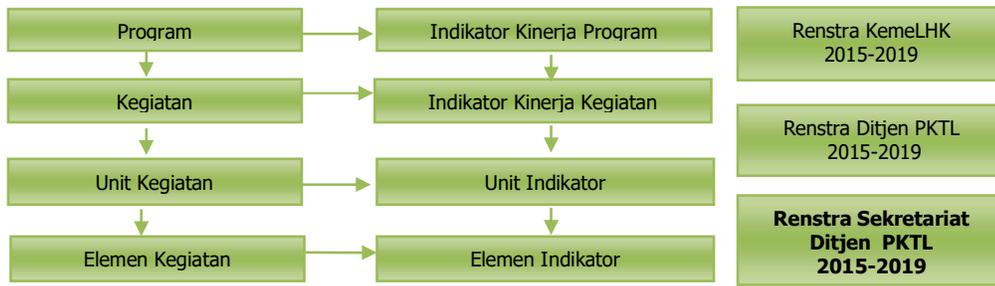
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
2. **Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; (b) pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan (c) penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
 - b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.
 - c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.
 3. **Bagian Keuangan dan Umum**, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Sedangkan fungsi dari Bagian Keuangan dan Umum yaitu menyelenggarakan : (a) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara; (b) pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan (c) pelaksanaan urusan perlengkapan. Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
 - b. Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebhendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

- c. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.
4. **Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; (b) penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan (c) penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:
- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
 - b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
 - c. Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memuat langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran kegiatan guna mendukung dan memastikan tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan tahun 2019.

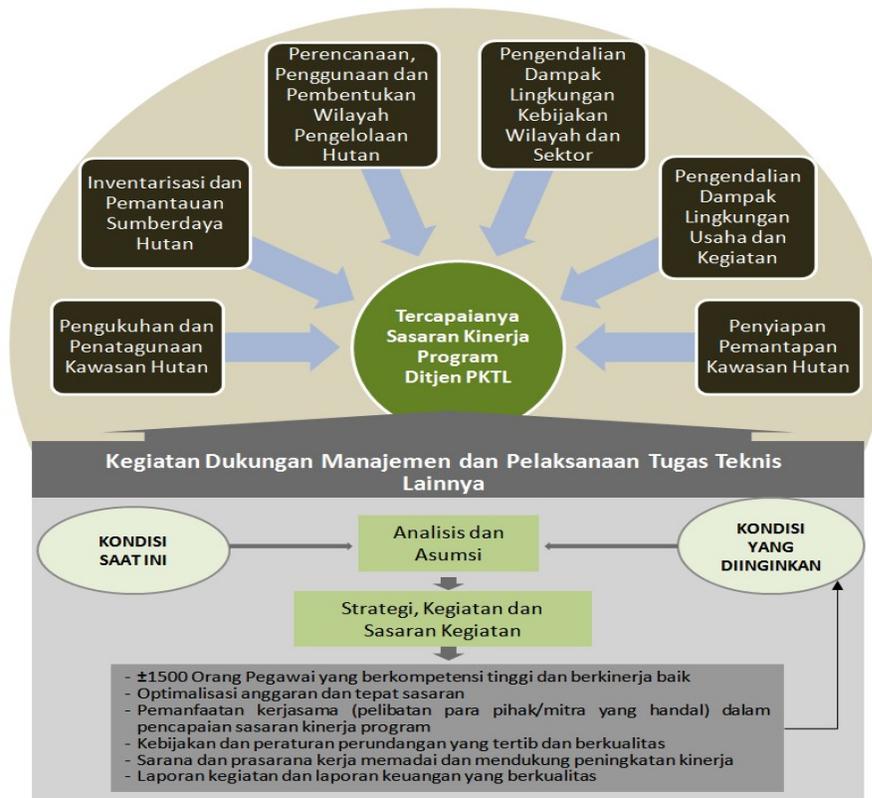
B. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.40/Menlhk-Setjen/2015, Renstra di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain terdiri atas Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis. Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis berada pada tingkatan yang sama di bawah Renstra Unit Kerja Eselon I, karena keduanya memiliki posisi yang sama sebagai penanggung jawab kegiatan. Kedudukan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kedudukan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Alur pikir Penyusunan Renstra Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019

Dalam rangka pencapaian seluruh Sasaran Program PKTL Tahun 2015-2019, maka diperlukan dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terutama melalui Intervensi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Regulasi/Kebijakan dan Kemitraan/Kerjasama.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini adalah :

1. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana tugas dan fungsi di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.173/MenLHK-II/2015 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan

2. Jumlah pegawai (PNS) di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan berjumlah 89 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Setditjen PKTL Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

Unit Kerja	Tahun 2015										
	Golongan (orang)				Tingkat Pendidikan (orang)						
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	10	67	11	1	1	12	47	8	19	1	1

Tabel 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Setditjen PKTL Berdasarkan Jabatan Fungsional Sampai Tahun 2014

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah (orang)	Σ(Jumlah)
Pranata Komputer		
Terampil	1	5
Calon Terampil	0	
Ahli	3	
Calon Ahli	1	
Analisis Kepegawaian		
Ahli	3	3
Calon Ahli	0	
Arsiparis		

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah (orang)	Σ(Jumlah)
Terampil	1	1
Calon Terampil	0	
Pranata Humas		
Ahli	0	1
Calon Ahli	1	
Perancang Peraturan Perundang-undangan		
Ahli	0	1
Calon Ahli	1	

- Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini menjadi bagian dari Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, dan menjadi salah satu instrumen dalam pencapaiannya.

C. Capaian Sampai Dengan Tahun 2014 (Periode Renstra Tahun 2010-2014)

Hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan akhir tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010-2014

Unit Kegiatan	Output	Target 2010-2014	Realisasi 2010-2014	Persentase
Penyusunan rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan	Buku Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan	Buku LAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku LAKIP Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	190 Judul	190 Judul	100%
	Laporan evaluasi Renja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan evaluasi penetapan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	3 Judul	1 Judul	33% (2 Judul untuk tahun 2013 - 2014 telah terintegrasi di dalam LAKIP)
	Laporan monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang planologi kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Evaluasi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	2 Judul	1 Judul	50% (Laporan Evaluasi Renstra Tahun 2010-2014)

Unit Kegiatan	Output	Target 2010-2014	Realisasi 2010-2014	Persentase
				dilaksanakan pada tahun 2015)
	Laporan Monev Inpres	3 Judul	1 Judul	33% (2 Judul untuk tahun 2013 - 2014 telah terintegrasi di dalam Laporan Monev Inpres)
	Laporan Monev Kegiatan Prioritas Nasional/KL/ Bidang	3 Judul	1 Judul	33%
	Laporan Kajian Pembangunan Planologi kehutanan	3 Judul	3 Judul	100%
	Laporan Identifikasi Responsif Gender	3 Judul	3 Judul	100%
Penyusunan data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan	Laporan data dan informasi kegiatan bidang planologi kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Dokumen Penyempurnaan Prosedur Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penyusunan Nama-Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Ditjen Planologi Kehutanan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependidikan	Dokumen kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Dokumen permasalahan dan penyelesaian kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Dokumen Sistem Informasi Pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Pemberdayaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Pengelolaan Data Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan	Draft peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan	21 Draft	44 Draft	209%
	Laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan	60 Lokasi	63 Lokasi	105%
Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan	10 Laporan	10 Laporan	100%
	Laporan Pembinaan Hukum Bidang Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
Pengembangan dan	Laporan Pengembangan Kerjasama	5 Judul	5 Judul	100%

Unit Kegiatan	Output	Target 2010-2014	Realisasi 2010-2014	Persentase
Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan	Bidang Planologi Kehutanan			
	Laporan Pemantauan Hasil Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang planologi	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Barang Milik Negara	Laporan UAKPB Es. II Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Es. I Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Es. I Semester II dan Tahunan	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan Laporan keuangan	Laporan Keuangan Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Keuangan Tahunan (Un Audited)	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Keuangan Tahunan (Audited)	5 Judul	5 Judul	100%
Pelaksanaan SPI	Laporan Pelaksanaan Monitoring SPI	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
	Laporan Sosialisasi SPI	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
Penyusunan TL-LHP	Laporan Pelaksanaan TL-LHP	4 Laporan	5 Laporan	125%
Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker	Laporan penyegaran ketatausahaan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
	Laporan penyegaran SDM Kearsipan/Petugas SIK lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	17 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%

D. Potensi dan Tantangan

1. Potensi

Potensi yang dimiliki Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam pencapaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019, adalah adanya sumber daya manusia yang cukup dan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai.

2. Tantangan dan Permasalahan

Dibalik potensi-potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kurun waktu 2010-2014 terkait kegiatan kesekretariatan. Permasalahan yang dimaksud, antara lain:

1. Adanya perubahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.
3. Koordinasi antar unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan belum berjalan secara optimal.
4. Masih lemahnya sistem data dan informasi sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan.

Selain tantangan dan permasalahan tersebut di atas, secara umum hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sebagai komponen dari pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat dilihat pada Gambar 4.

<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pegawai yang memadai (89 orang) • Dukungan anggaran per tahun rata-rata 70 -80 Milyar • Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai • Eksistensi organisasi baru Ditjen PKTL • Upaya penerapan Teknologi Informasi yang kontinyu 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pelayanan publik belum optimal • Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL masih dalam proses pematapan • Koordinasi antar unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan belum berjalan secara optimal • Lemahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan
<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan para pihak lain terbuka luas • Adanya dukungan positif dari Dirjen dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PKTL serta Kepala BPKH 	<p>Tantangan/Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan <i>Stakeholder</i> akan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan • Moratorium penerimaan pegawai (ASN) • Penganggaran yang masih bersifat tahunan

Gambar 4. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

E. Kondisi yang diinginkan

Kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 adalah terselenggaranya dan terjaminnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berjalan yang efektif dan efisien guna, mendukung tercapainya Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, maka setidaknya kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus dapat mewujudkan antara lain :

- SDM yang berkompentensi tinggi dan berkinerja baik
- Anggaran yang optimal dan tepat sasaran

- Pemanfaatan kerjasama (pelibatan para pihak/mitra yang handal) dalam upaya pencapaian sasaran kinerja program .
- Kebijakan dan peraturan perundangan yang tertib dan berkualitas
- Sarana dan prasarana kerja yang memadai dan mendukung peningkatan kinerja
- Laporan kegiatan dan laporan keuangan yang berkualitas

F. Sistematika

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 ini memuat :

1. Kata Pengantar;
2. Pendahuluan;
3. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan;
4. Sasaran dan Kinerja Unit Kegiatan;
5. Kerangka Regulasi dan Pendanaan;
6. Penutup.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. Arah Kebijakan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019, bahwa sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah :

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual
2. Tersedianya data dan informasi SDH
3. Terkendalinya penggunaan kawasan hutan
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Pada prinsipnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok yang diamanahkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Sasaran Kegiatan

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan telah ditetapkan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan" dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P9.4.K6)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S3.P9.4.K6.IKKa)

Pada Hakikatnya, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek perencanaan program, kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan Tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang baik diharapkan dapat pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan kedepan.

BAB III

SASARAN DAN KINERJA UNIT KEGIATAN

A. Sasaran Unit Kegiatan

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran kegiatan **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) unit kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. **Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dengan sasaran terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. **Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dengan sasaran tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
3. **Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dengan sasaran tersusunnya Rancangan Peraturan Perundangan, Tertanganinya Permasalahan Hukum dan Tertanganinya Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
4. **Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum** dengan sasaran tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum.

B. Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan menetapkan langkah-langkah strategis di setiap kegiatan, sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan program planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin). Secara lengkap indikator kinerja kegiatan tersebut dijabarkan dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya	Dokumen	Penyusunan Rencana	Tersusunnya Rencana	Buku Rencana
	Perencanaan	rencana dan	Kerja Ditjen Planologi	Kerja Ditjen Planologi	Kerja Ditjen
	Program dan	anggaran bidang	Kehutanan dan Tata	Kehutanan dan Tata	Planologi
	Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan	Planologi	Lingkungan	Lingkungan	Kehutanan dan
	Ditjen Planologi	Kehutanan dan			Tata Lingkungan
	Evaluasi dan	Tata Lingkungan	Penyusunan Rencana	Tersusunnya Rencana	Buku Rencana
	Pelaporan Ditjen		Strategis Ditjen Planologi	Strategis Ditjen Planologi	Strategis Ditjen
	Planologi		Kehutanan dan Tata	Kehutanan dan Tata	Planologi
	Kehutanan dan		Lingkungan	Lingkungan	Kehutanan dan
	Tata Lingkungan				Tata Lingkungan
			Penyusunan Perjanjian	Tersusunnya Perjanjian	Buku Perjanjian
			Kinerja Ditjen Planologi	Kinerja Ditjen Planologi	Kinerja Ditjen
			Kehutanan dan Tata	Kehutanan dan Tata	Planologi Kehutanan
			Lingkungan	Lingkungan	dan Tata Lingkunga
			Penyusunan Rencana	Tersusunnya Rencana	Dokumen
			Kegiatan dan Anggaran	Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kegiatan
			(RKA-KL) Ditjen Planologi	(RKA-KL) Ditjen Planologi	dan Anggaran
			Kehutanan dan Tata	Kehutanan dan Tata	(RKA-KL) Ditjen
			Lingkungan	Lingkungan	Planologi
					Kehutanan dan
					Tata Lingkungan
			Penyusunan Standar	Tersusunnya Standar	Buku Standar
			Kegiatan dan Biaya	Kegiatan dan Biaya	Kegiatan dan
			Bidang Planologi	Bidang Planologi	Biaya Bidang
			Kehutanan dan Tata	Kehutanan dan Tata	Planologi
			Lingkungan	Lingkungan	Kehutanan dan
					Tata Lingkungan
			Koordinasi Program dan	Terkoordinasinya	Laporan
			Anggaran dengan	Program dan Anggaran	Koordinasi
			Instansi Terkait	dengan Instansi Terkait	Program dan
					Anggaran dengan
					Instansi Terkait
			Koordinasi Perencanaan	Terkoordinasinya	Laporan
			Kegiatan Bidang	Perencanaan Kegiatan	Koordinasi
			Planologi Kehutanan dan	Bidang Planologi	Perencanaan
			Tata Lingkungan	Kehutanan dan Tata	Kegiatan Bidang
				Lingkungan	Planologi
					Kehutanan dan
					Tata Lingkungan
		Laporan monev dan pelaporan	Monev pelaksanaan kegiatan anggaran	Tersusunnya Laporan Monev pelaksanaan	Laporan monev pelaksanaan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
		pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	bidang Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	kegiatan anggaran bidang Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	kegiatan anggaran bidang Planologi kehutan dan Tata Lingkungan
		Kehutan dan Tata Lingkungan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan
			Evaluasi Renja Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan evaluasi Renja Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Laporan evaluasi Renja Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan
			Monev Pelaksanaan Rencana Aksi	Tersusunnya Laporan Monev Rencana Aksi	Laporan Monev Rencana Aksi
			Evaluasi Renstra Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Renstra Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Laporan Evaluasi Renstra Ditjen Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan
			Pelaksanaan SPIP	Terlaksanakannya SPIP di 28 Satker Pusat dan Daerah	Laporan Pelaksanaan SPIP di 28 Satker Pusat dan Daerah
		Dokumen data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan bidang Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Data Informasi dan Kehumasan bidang Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan	Laporan Data Informasi dan Kehumasan kegiatan bidang Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan
			Penyusunan buku Statistik Bidang Planologi Kehutan dan Tata	Tersusunnya buku Statistik Bidang Planologi Kehutan dan Tata	Buku Statistik Bidang Planologi Kehutan dan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
			Lingkungan	Lingkungan	Tata Lingkungan
			Penyusunan buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Penyempurnaan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Analisis Jabatan	Dokumen Penyempurnaan Analisis Jabatan
			Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Laporan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
			Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian/Pengurusan Umum	Terkelolanya dan Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian/Pengurusan Umum	Dokumen kepegawaian

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
			Konsultasi Masalah Kepegawaian Dengan Instansi Terkait	Terakomodirnya Masalah Kepegawaian Dengan Instansi Terkait	Dokumen permasalahan dan penyelesaian kepegawaian
			Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Laporan Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
	Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatkan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan Teknis Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Bimbingan Teknis Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
					Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional	Terkelolanya Jabatan Fungsional	Laporan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional
Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundangan, Tertanganinya Permasalahan Hukum dan Tertangannya Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang planologi Kehutanan dan tata lingkungan	Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	indikator Draft peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		Laporan Penanganan permasalahan hukum bidang planologi Kehutanan dan tata lingkungan	Penanganan dan Penyelesaian permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menangani dan menyelesaikan permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Mengembangkan dan Memantau Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		Tata Lingkungan	Workshop Penyusunan Proposal HLN	Terlaksananya Workshop Penyusunan Proposal HLN	Laporan Workshop Penyusunan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
					Proposal HLN
			Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersosialisasikannya Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Laporan SIMAK-BMN	Pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN, Hibah, Penghapusan, Proses Penetapan HDNo
			Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan (Wasdal)
			Penyusunan Laporan UAKPB Es. II Semester I	Tersusunnya Laporan UAKPB Es. II Semester I	Laporan UAKPB Es. II Semester I
			Penyusunan Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan	Tersusunnya Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan	Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan
			Penyusunan Laporan UAPPB Es. I Semester I	Tersusunnya Laporan UAPPB Es. I Semester I	Laporan UAPPB Es. I Semester I
			Penyusunan Laporan UAPPB Es. I Semester II dan Tahunan	Tersusunnya Laporan UAPPB Es. I Semester II dan Tahunan	Laporan UAPPB Es. I Semester II dan Tahunan
			Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Dokumen Pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan Mesin,

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
					Kendaraan Dinas dan Layanan Pengadaan
		Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan	Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkendalinya Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Bimbingan Teknis Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua	Terimplementasinya Laporan Keuangan Berbasis Akrua	Laporan Keuangan Berbasis Akrua
			Tata Kelola Administrasi Keuangan	Tertata dan Terkelolanya Administrasi Keuangan	Laporan Tata Kelola Administrasi Keuangan
		Laporan penyusunan TL-LHP	Penelaahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Terlaksananya Penelaahan dan Terpantaunya Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP
			Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Terkoordinasinya Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP
		Sistem Digital Naskah Dinas	Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Terselenggaranya Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Laporan Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker
			Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Laporan Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan
			Pengelolaan dan	Terkelolanya dan	Laporan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
			Penataan Kearsipan	Tertatanya Kerarsipan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Pengelolaan dan Penataan Kearsipan
			Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Terfasilitasinya Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Laporan Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan
			Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Laporan Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif

BAB IV

KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam rangka mewujudkan pra kondisi pembangunan nasional terutama dalam bidang tata kelola kawasan hutan dan tata kelola lingkungan hidup.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerangka regulasi antara lain adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan kerangka regulasi dan pelaksanaan regulasi yang sejalan dengan prioritas program planologi kehutanan dan tata lingkungan serta segera melaksanakan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.

Pelaksanaan kegiatan akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi pada pokoknya diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dan pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik.

Perbaikan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal dan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin baik. Perbaikan tata kelola pemerintahan antara lain adalah penataan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan kualitas pegawai (SDM), penyempurnaan sistem administrasi dan keuangan serta pengawasan.

B. Kerangka Pendanaan

Rencana pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disusun dengan asumsi adanya ketersediaan anggaran sekitar Rp.70-80 Milyar per tahun (di luar belanja pegawai).

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan program planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kemitraan dengan lembaga donor, dunia usaha, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan alternatif sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Renstra Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini merupakan instrumen dalam mencapai sasaran program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 yang diamanatkan di dalam lingkungan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan demikian, Renstra ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan capaian akhir yang hendak dituju adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah (UPT), dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.

Untuk selanjutnya, Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) sebagai upaya untuk mengharmonisasikan antara kinerja yang diharapkan dengan input yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di setiap bagian lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan demikian, seluruh bagian diharapkan dapat mengambil peran dengan melaksanakan seluruh elemen kegiatan untuk mencapai elemen indikator yang telah digariskan di dalam Renstra Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini.

LAMPIRAN

Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Unit Indikator	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)	Target Kumulatif					Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)				
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Penyusunan buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul					
	Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen	-	-	-	-					
				Penyempurnaan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Analisis Jabatan	Dokumen Penyempurnaan Analisis Jabatan	-	1 Dokumen								
				Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terseleenggaranya Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
				Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terseleenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
				Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Terseleenggaranya Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Laporan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
			Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian/ Pengurusan Umum	Terkelolanya dan Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian/ Pengurusan Umum	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
				Konsultasi Masalah Kepegawaian Dengan Instansi Terkait	Terakomodirnya Masalah Kepegawaian Dengan Instansi Terkait	Dokumen permasalahan dan penyelesaian kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
				Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Laporan Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
			Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terseleenggaranya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
				Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
				Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatkan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
				Bimbingan Teknis Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Bimbingan Teknis Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional	Terkelolanya Jabatan Fungsional	Laporan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
	Penyusunan/ pembahasan/ rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundangan, Tertanganinya Permasalahan Hukum dan Tertanganinya Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang planologi Kehutanan dan tata lingkungan	Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5 draft	5 draft	5 draft	5 draft	5 draft					
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi					

Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Unit Indikator	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)	Target Kumulatif					Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)				
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Laporan penyusunan TL-LHP	Penelaahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Terlaksananya Penelaahan dan Terpantaunya Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
			Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Terkoordinasinya Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan						
			Sistem Digital Naskah Dinas, Layanan Penatausahaan dan Persuratan	Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Terseleenggaranya Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Laporan Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
			Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Terseleenggaranya Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Laporan Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
			Pengelolaan dan Penataan Kearsipan	Terkelolanya dan Tertatanya Kearsipan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengelolaan dan Penataan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
			Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Terfasilitasinya Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Laporan Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
			Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Laporan Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						



Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp.021-5730289 | Email: paplanologi@gmail.com